

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jepang adalah sebuah negara yang terlibat langsung dalam peristiwa besar bersejarah, Perang Dunia Kedua, khususnya di kawasan Pasifik. Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya terjadi di kawasan Samudra Pasifik, pulau-pulau terdekatnya, dan di Asia. Kala itu, Perang Pasifik terjadi dikarenakan Jepang terdesak pasca embargo minyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Akibatnya, Jepang kehilangan persediaan bahan bakar bagi industri dan militernya, sehingga membuat Jepang memutuskan untuk melakukan ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah ini dilakukan Jepang demi mendapatkan sumber-sumber material yang dibutuhkannya kala itu.

Perang Pasifik terjadi ketika Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada 7 Desember 1941. Sehari setelah penyerangan dilakukan, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada mengumumkan perang terhadap Jepang. Kemenangan Jepang setelah pengeboman di Pearl Harbour yang memakan nyawa banyak orang, mendorong Jepang melebarkan sayapnya ke kawasan Asia Tenggara. Jepang menguasai daerah-daerah di kawasan Asia Tenggara yaitu untuk dijadikan benteng dan menjaga suplai demi melawan serangan dari negara-negara sekutu (yakni Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia) di kawasan Pasifik selama perang berlangsung.

Kala itu, kebanyakan negara di kawasan Asia Tenggara tengah dikoloni oleh bangsa-bangsa Eropa. Inggris menguasai Myanmar, Malaysia, dan Kalimantan (Borneo). Perancis menguasai Kamboja, Laos, dan Vietnam. Spanyol menguasai Filipina. Kemudian Belanda menguasai Indonesia (Hindia Belanda).

Beberapa minggu setelahnya, Jepang mulai masuk ke Indonesia pada 11 Januari 1942. Saat itu tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang terus mengalahkan pasukan Belanda di Kalimantan, Sumatera, hingga akhirnya sampai di pulau Jawa. Selama kependudukannya di Indonesia, Jepang turut menerapkan beberapa sistem yang diberlakukan terhadap negara jajahannya yang biasa disebut sebagai Imperialisme.

Imperialisme (dalam *Encyclopaedia Britannica*), adalah kebijakan, praktik atau usaha negara yang bertujuan untuk memperluas kekuasaan dan dominasi, terutama melalui perolehan teritorial langsung atau dengan memperoleh kontrol ekonomi dan politik, menguasai wilayah dan masyarakat lain (The Editors of *Encyclopaedia Britannica*, 1998).

Dalam hal ini, imperialisme Jepang telah mempengaruhi tata kehidupan masyarakat Indonesia melalui salah satu sistem yang dikenal dengan Rukun Tetangga (RT) atau *Tonarigumi*.

Rukun Tetangga (RT) di Indonesia berawal dari tentara pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Dalam bahasa Jepang, Rukun Tetangga (RT) disebut dengan *Tonarigumi* yang artinya “kerukunan tetangga”. *Tonarigumi* sebenarnya pertama kali diperkenalkan di Pulau Jawa yang berada dibawah kontrol Angkatan Darat Jepang, dan kemudian menyebar juga ke wilayah yang berada di bawah kontrol Angkatan Laut Jepang, seperti daerah Sulawesi hingga Indonesia Timur (Aiko Kurasawa, 2015).

Kala itu di Jepang, terdapat cikal bakal *Tonarigumi* pada masyarakat feodal pra-Meiji. Pada zaman Keshogunan Tokugawa (periode Edo), unit dasar masyarakat pedesaan disebut *buraku* (*Tonarigumi*). *Buraku* biasanya membentuk suatu unit kerja pertanian, memanfaatkan sistem irigasi bersama, serta menjalankan gotong royong dalam bidang pertanian. Akan tetapi, menjelang Perang Dunia Kedua, dalam kerangka kebijakan “Mobilisasi Total” yang baru dianut, pemerintah (Kementerian Dalam

Negeri Jepang) mulai menaruh perhatian pada manfaat *Tonarigumi* ini sebagai unit terendah untuk melakukan kontrol dan sekaligus memobilisasikan penduduk.

Sebagai langkah pertama, pemerintah (Kementerian Dalam Negeri Jepang) mengumumkan Program Reorganisasi Persekutuan Regional atau “*Burakukai Chounaikai tou Seibi Youkou*” pada bulan September 1940. Program ini mengusulkan pembentukan *Tonarigumi* yang terdiri dari sekitar sepuluh rumah tangga, seragam secara nasional. Dalam program ini, Rukun Tetangga (RT) dirumuskan sebagai organisasi dasar untuk menerapkan kebijakan nasional di kalangan penduduk, merencanakan latihan moral penduduk serta kesatuan spiritual, memaksakan peraturan atas perekonomian yang terkontrol, serta menstabilkan kehidupan rakyat (Aiko Kurasawa, 2015:209-212).

Fungsi *Tonarigumi* menurut program pemerintah yang diumumkan pada 11 Januari 1944, kegiatan utamanya meliputi (Aiko Kurasawa, 2015:217):

1. Membantu *Keiboudan* (organisasi keamanan) dalam mempertahankan tanah air dan melawan serangan udara, kebakaran, mata-mata, dan penjahat.
2. Memberitahu rakyat mengenai dekrit, peraturan, dan petunjuk pemerintah, serta menyadarkan mereka.
3. Membantu peningkatan produksi dan penyerahan padi serta tanaman lain.
4. Mendistribusikan *catu*¹ barang.
5. Bekerja sama dengan pemerintah militer dalam urusan militer dan menjalankan pelayanan lain.
6. Memajukan gotong royong di kalangan penduduk.

Dari fungsi yang disebutkan di atas adalah fungsi *Tonarigumi* yang diterapkan di Jawa dan memiliki kesamaan yang ada di Jepang dengan sedikit perbedaan tekanan karena lingkungan yang berbeda.

¹ *Catu*, yaitu bagian (makanan, barang, dan sebagainya) yang sudah ditentukan banyaknya; ransum; jatah (kbbi.kemendikbud.go.id).

Pendudukan tentara Jepang di Indonesia adalah bagian dari rangkaian politik imperialisme di Asia Tenggara. Kedatangan Jepang ke Indonesia adalah bagian dari usaha mereka untuk membangun suatu kekaisaran di kawasan Asia. Kemunculan imperialisme Jepang adalah buah dari keberhasilan Restorasi Meiji di Jepang yang berdampak pada modernisasi di berbagai bidang kehidupan.

Dalam hal ini perubahan yang terjadi pada era Restorasi Meiji membuahkan hasil yang sangat penting dalam sejarah Jepang. Karena setelah Restorasi Meiji, Jepang seolah memiliki suatu kekuatan yang melampaui batas kekuatan Asia. Hal itu lah yang menyebabkan terjadinya invasi ke kawasan Benua Asia dengan ambisi membentuk Asia Timur Raya. Keinginan Jepang dalam pembentukan kawasan persemakmuran bersama negara-negara Asia yang tertindas akhirnya menyebabkan konflik yang disebut Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya.

Setelah berhasil menduduki Indonesia, tentara pendudukan Jepang menerapkan sebuah kebijakan. Kebijakan tentara pendudukan Jepang terhadap rakyat Indonesia memiliki dua prioritas, yakni mentiadakan pengaruh-pengaruh dari Barat di kalangan rakyat Indonesia dan memanfaatkan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Berdasarkan itulah, tentara pendudukan Jepang secara ekstensif melakukan eksploitasi ekonomi, penetrasi politik, dan tekanan kultural kepada masyarakat Indonesia hingga ke tingkat pedesaan.

Kebijakan yang dilakukan tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada dasarnya adalah untuk menghapus pengaruh-pengaruh dari Barat dan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) demi kepentingan perang Asia Timur Raya. Kala itu, Jepang membuat sebuah propaganda yang disebut Gerakan Tiga A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Melalui propaganda ini, Jepang menyuarakan tali persaudaraan sesama bangsa Asia untuk terbebas dari pengaruh bangsa Barat.

Tokoh-tokoh nasionalis Indonesia merespon dengan baik karena ada banyak perkembangan yang dibawa Jepang di awal kependudukannya. Namun, kebijakan Jepang yang mengatur ekonomi masyarakat terealisasi dalam politik penyerahan padi secara paksa berakibat pada kemiskinan endemis, menurunnya angka kesehatan, meningkatnya angka kematian, dan berbagai penderitaan fisik rakyat pedesaan (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto., 1993:4).

Pada tahun 1943 Jepang mulai melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Kala itu Jepang membentuk beberapa organisasi untuk mewadahi mereka, salah satunya adalah Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA yang dibentuk pada 16 April 1943. Tujuan terselubung dari organisasi yang dibentuk oleh Jepang ini adalah untuk membujuk kaum nasional agar mau memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran pada pemerintahan Jepang. Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) diprakarsai oleh Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Mas Mansyur. Berbagai kegiatan PUTERA dipublikasikan melalui media propaganda Jepang. Kala itu, Jepang juga mengajak tokoh pergerakan Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan. Pada bulan September 1943, Soekarno kala itu menjabat sebagai ketua *Chuo Sangi-In* atau Dewan Pertimbangan Pusat yang bertugas memberikan masukan di segala bidang kepada pemerintahan Jepang di Indonesia. Pada bulan November 1943, *Chuo Sangi-In* meminta Jepang untuk memperbolehkan bendera merah-putih dikibarkan di Indonesia dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Akan tetapi permintaan ini ditolak oleh Perdana Menteri Jepang, Hideki Tōjō. Kala itu Soekarno, Hatta, dan yang lain kerap menggunakan organisasi Jepang ini untuk merundingkan kemerdekaan Indonesia dengan para pejuang bawah tanah, seperti Sutan Sjahrir (Indonesia Dalam Peristiwa tvOne, 2021).

Namun kala itu, Jepang sudah mulai tersudut dalam Perang Asia Timur Raya, dan *Tonarigumi* digunakan sebagai dasar pelatihan militer bagi warga desa yang dipaksa kemudian menjadikannya sebagai tentara cadangan yang membela Jepang.

Pembentukan *Tonarigumi* ini memudahkan tentara pendudukan Jepang untuk mengendalikan warga dan juga untuk melakukan mobilisasi sumber daya alam ataupun manusia guna kepentingan Jepang kala itu (Aiko Kurasawa, 2015).

Selepas kependudukan Jepang di Indonesia, pemberlakuan sistem *Tonarigumi* atau yang dikenal dengan nama Rukun Tetangga (RT) masih berlaku hingga saat ini.

Hal ini lah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Imperialisme Jepang Pada Sistem Pemerintahan Indonesia”.

1.2. Penelitian yang Relevan

Selama melakukan penelitian ini, penulis tidak menemukan penelitian yang relevan sehingga, penulis hanya menggunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan media internet yang relevan dengan penelitian ini.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi bahwa:

1. Jepang memaksa warga desa untuk menjadikan mereka sebagai tentara cadangan untuk membela Jepang dengan *Tonarigumi* yang menjadi dasar pelatihan militer saat Perang Pasifik terjadi.
2. Pengeboman di Pearl Harbour mendorong Jepang untuk melakukan ekspansi wilayah ke kawasan Asia Tenggara untuk menguasai suplai, khususnya di Indonesia.
3. Politik Imperialisme Jepang mengatur perekonomian Indonesia yang menyebabkan penderitaan terhadap rakyat pedesaan.

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi penelitian ini pada: Sejarah dan Dampak Imperialisme Jepang Pada Sistem Pemerintahan Indonesia.

1.5. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis menemukan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa alasan Jepang memulai Politik Imperialisme di Indonesia?
2. Apa dampak Politik Imperialisme Jepang di Indonesia?
3. Bagaimana respon tokoh-tokoh nasionalis Indonesia terhadap Politik Imperialisme Jepang?

1.6. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai:

1. Alasan Jepang memulai Politik Imperialisme di Indonesia.
2. Pengaruh Politik Imperialisme Jepang di Indonesia.
3. Respon tokoh-tokoh nasionalis Indonesia terhadap Politik Imperialisme Jepang.

1.7. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapat dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai fungsi Politik Imperialisme Jepang yang diterapkan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Di samping itu juga memberikan penjelasan kepada pembaca tentang kebijakan yang diterapkan oleh Politik Imperialisme Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang, serta manfaat yang didapat masyarakat Indonesia atas kebijakan yang diterapkan kala itu. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat di bidang ilmu sejarah guna memperkaya penulisan sejarah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Bagi Penulis: Memperkaya penulisan dan menambah wawasan tentang sejarah, fungsi dan kebijakan dari Politik Imperialisme Jepang yang diterapkan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Penelitian ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Bagi Pembaca: Menambah referensi pembaca dalam melakukan penelitian tentang sejarah, fungsi dan kebijakan dari Politik Imperialisme Jepang yang diterapkan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang.

1.8. Landasan Teori

Agar memudahkan dalam penelitian, terutama pada tahap analisis, maka diperlukan konsep atau teori dari variabel berikut, yaitu:

1. Imperialisme

Kata imperialisme berasal dari bahasa Latin *imperium* yang artinya kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau aturan. Umumnya yang diberi *imperium* adalah seorang raja atau kaisar. Menurut Encyclopaedia Britannica, *Imperialisme* adalah kebijakan, praktik atau usaha negara yang bertujuan untuk memperluas kekuasaan dan dominasi, terutama melalui perolehan teritorial langsung atau dengan memperoleh kontrol ekonomi dan politik, menguasai wilayah dan masyarakat lain (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 1998). Selain faktor tersebut, ada juga tujuan lain mencapai tingkat kekuatan besar dan menguasai dunia, misalnya dasar imperialisme Jepang.

Sementara itu menurut Henry Pratt Fairchild, *Imperialisme* adalah kebijakan nasional dan praktek ekspansi baik dengan aneksasi paksa wilayah yang bertetangga ataupun dengan mendapatkan wilayah koloni asing yang belum dijelajahi dan dieksploitasi dengan tujuan menguasai pasar-pasar koloni asing, memonopoli bahan-bahan mentah serta mempekerjakan tenaga kerja buruh yang murah (Henry Pratt Fairchild, 1944:150).

Berdasarkan kedua pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Imperialisme* merupakan sistem pemerintahan yang mengendalikan suatu negara untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di negara tersebut untuk menambahkan kekayaan, kekuasaan, serta kekuatan militer bagi negara penjajahnya.

2. Pemerintahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Pemerintahan* adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan

kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Surbakti (dalam Fathur Rahman) menjelaskan bahwa secara etimologis, kata Pemerintahan berasal dari kata Yunani, ‘*kubernan*’ atau *nahkodah kapal*. Yang artinya, menatap ke depan (Fathur Rahman, 2018:2). Sedangkan menurut Martini dan Juwono (dalam Fathur Rahman), mengatakan bahwa pemerintahan dari kata ‘perintah’. Kata perintah memiliki empat unsur, yaitu: *pertama*, ada dua belah pihak yang saling terikat. *Kedua*, kedua belah pihak saling mempunyai hubungan kontraktual. *Ketiga*, pihak yang memerintah mempunyai kewenangan. *Keempat*, pihak yang diperintah mempunyai ketaatan (Fathur Rahman, 2018:2).

Dari istilah di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan ke depan.

3. 隣組(となりぐみ)

隣組(となりぐみ)は、日本がインドネシアを占領していたときに課した制度である。デジタル大辞泉(goo辞書の内)によると、隣組(となりぐみ)は第二次大戦下、国民統制のためにつくられた地域組織。町内会・部落会の下に属し、近隣数軒が一単位となって、互助・自警・配給などにあつた(goo辞書のチーム・2022)。

隣組(となりぐみ)は、概ね第二次世界大戦下の日本において各集落に結成された官主導の銃後組織である(Shigeki Toyama, Seiichi Imai, & Akira Fujiwara, 1959:164)。

以上の用語から、「隣組(となりぐみ)」(当時)は、日本が占領下(特にインドネシア)で戦争などのために人材を動員・活用しようとしたものであると結論づけることができる。それから、戦争が終わっても、「隣組」は住宅地の最小行政単位として今日まで使われており、(占領時代に思想的側面から大きな変化があったが)当時(インドネシアでは)「ルクン・テタンガ(RT)」と呼ばれてる。

Terjemahan:

Tonarigumi (Rukun Tetangga)

Tonarigumi atau Rukun Tetangga (RT) adalah sistem yang diberlakukan oleh Jepang selama pendudukannya di Indonesia. Menurut Kamus Digital Daijisen (dalam goo-Jisho), *Tonarigumi* adalah organisasi lokal yang diciptakan untuk mengendalikan masyarakat desa selama Perang Dunia II. Berasal dari *Chonakai* dan *Burakukai*, sejumlah rumah tangga yang berdekatan membentuk sebuah kelompok dan bertanggung jawab atas usaha gotong royong, pengawasan lingkungan, pemberian jatah makanan, dan lain-lain (Tim goo-Jisho, 2022).

Tonarigumi atau Rukun Tetangga (RT) pada awalnya adalah sebuah organisasi bersenjata yang dibentuk dan dipimpin oleh pemerintah di Jepang selama Perang Dunia II atau Perang Pasifik (Shigeki Toyama, Seiichi Imai, & Akira Fujiwara, 1959:164).

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem *Tonarigumi* (kala itu) merupakan upaya Jepang dalam mengerahkan dan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk perang dan keperluan lainnya pada masa pendudukan (khususnya di Indonesia).

Meskipun perang berakhir, sistem *Tonarigumi* masih digunakan sebagai unit pemerintah terkecil di wilayah pemukiman hingga saat ini (meskipun terdapat sedikit perubahan yang signifikan dari aspek ideologis di era pendudukan), yang kemudian (di Indonesia) dikenal sebagai Rukun Tetangga (RT).

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu, landasan teori juga berguna sebagai gambaran umum tentang latar penelitian. Penulis menggunakan data yang terkumpul atau diperoleh, baik data primer ataupun data sekunder disusun dan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan pada penelitian ini.

Sebagai sumber referensi utama dalam penulisan penelitian ini, penulis berpusat pada buku yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Hermawan Sulistyono dengan judul *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*, yang ditulis oleh Aiko Kurasawa dengan judul *Nihon Senryoka no Jawa Noson ne Hen'yo*, Tokyo: Sōshisha, 1992, serta buku yang berjudul *Masyarakat dan Perang Asia Timur Raya: Sejarah dengan Foto yang Tak Terceritakan* oleh Aiko Kurasawa dan sumber-sumber pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.10. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, landasan teori serta sistematika penulisan.

Bab II: Invasi Jepang Di Asia Tenggara

Merupakan gambaran mengenai sejarah berjalannya invasi Imperialisme Jepang di kawasan Asia, khususnya di Asia Tenggara, Indonesia.

Bab III: Analisis Pengaruh Imperialisme Jepang Di Indonesia

Merupakan pembahasan tentang analisis dampak Imperialisme Jepang yang diterapkan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang.

Bab IV: Simpulan

Merupakan penjelasan kesimpulan dari hasil penelitian.

